

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

Kementerian Perhubungan membentuk 25 Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar di seluruh Indonesia. Balai tersebut bertugas mengelola terminal tipe A, jembatan timbang, pelabuhan penyeberangan, sampai dengan pengawasan bus antar-kota antar-provinsi (AKAP) dan angkutan sewa di wilayahnya. Pembentukan BPTD mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan NO 154/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Transportasi Darat yang diundangkan pada 5 Januari 2017.

Balai Pengelola Transportasi Darat merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat bekerja fokus mengelola dan mengembangkan prasarana perhubungan darat wilayahnya. Dengan demikian, kehadiran Balai Pengelola Transportasi Darat diharapkan meningkatkan pelayanan melalui pembenahan pada terminal tipe A dan jembatan timbang, baik dari sisi peralatan maupun personel. Sebagaimana diketahui, Undang-undang NO. 23/ 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa terminal tipe A dan jembatan timbang beralih kewenangannya dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. “Pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat didasarkan pula pada pertimbangan bahwa efektivitas dan efisiensi karena Balai

Pengelola Transportasi Darat akan lebih fokus dalam mengembangkan wilayah kerjanya”.

Sebanyak 25 Balai Pengelola Transportasi Darat yang terbentuk antara lain BPTD Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, serta Papua dan Papua Barat. Balai Pengelola Transportasi Darat ini terbagi dalam tiga tipe yaitu Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A, B, dan C. Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A dan B memiliki kesamaan menjadi balai yang mengelola di wilayah yang berkarakteristik daratan. Akan tetapi, Balai Pengelola Transportasi Darat tipe A menangani pelabuhan penyeberangan komersil ataupun perintis. Sementara itu, Balai Pengelola Transportasi Darat tipe B hanya mengelola pelabuhan penyeberangan perintis. Sedangkan, Balai Pengelola Transportasi Darat tipe C melaksanakan pengelolaan transportasi darat pada wilayah dengan karakteristik kepulauan. Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara merupakan BPTD tipe B yang mengelola pelabuhan penyeberangan perintis.

#### **4.1.2 Gambaran Umum Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara**

Berlokasi di Jalan Persatuan No.5, Kampung Baru, Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20217. Bangunan lama seperti gedung sekolah dengan lapangan di depannya yang cukup luas yang biasanya digunakan oleh pegawai-pegawai untuk melaksanakan olahraga

dan senam. Warna cat gedung putih bercampur dengan biru gelap serta dihiasi beberapa tanaman di depan ruangan dan halaman dengan pepohonan.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara**

##### 1. Visi

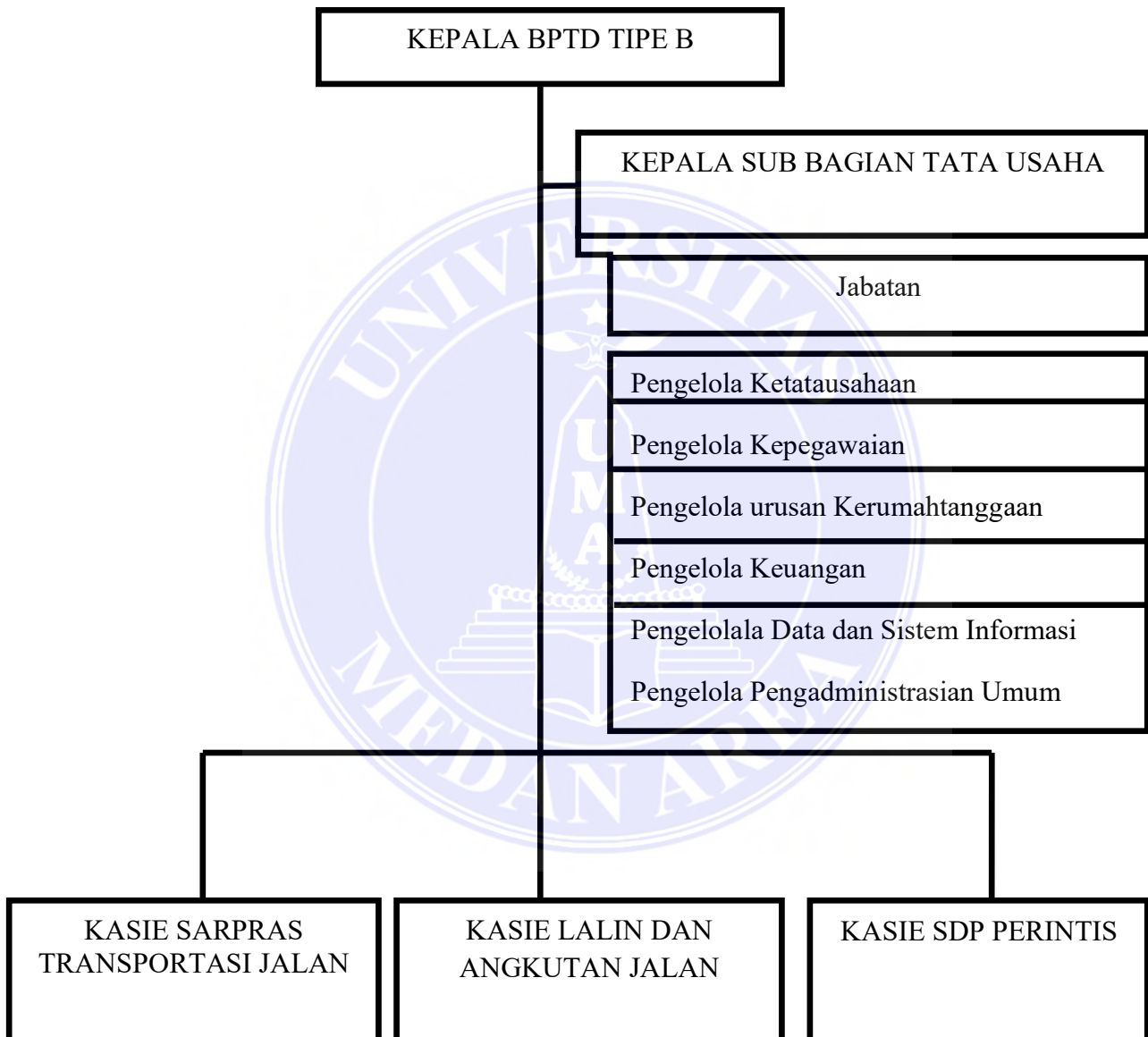
“Menjadi organisasi pemerintah yang profesional yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadilan, yang aman, selamat, mudah dijangkau, berkualitas, berdaya saing tinggi, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya dan dapat dipertanggung jawabkan”.

##### 2. Misi

- a. Menciptakan sistem pelayanan transportasi darat yang aman, selamat, dan mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Indonesia.
- b. Menciptakan dan mengorganisasikan transportasi jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta perkotaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan.
- c. Mendorong berkembangnya industri transportasi darat yang transparan dan akuntabel.
- d. Membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

#### 4.1.4 Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara

**Bagan 4.1 Struktur Organisasi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah  
II Provinsi Sumatera Utara**



Sumber: BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara 2021

**Tabel 4.1 Keterangan**

JABATAN	KETERANGAN
KEPALA BPTD TIPE B	Batara, ST, MT
KEPALA TATA USAHA	Santri Aang Amin Abidin, ST
KASIE SARPRAS	Merlando Yosua Sirait, S.SIT, MT
KASIE LALIN	Hotden Henrikus Naibaho, ST
KASIE SDP PERINTIS	Ibrohim, SE. MM

*Sumber: BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara 2021*

#### **4.1.5. Tugas pokok Dan Fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara**

Tugas pokok dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dijabarkan sebagai berikut ini:

##### **1. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara**

Kepala Balai Bidang Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas yaitu:

- a. Menyusun rencana, program dan anggaran Balai Pengelola Transportasi Darat
- b. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
- c. Melaksanakan kalibrasi peralatan pengujian bekala kendaraan bermotor, pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan
- d. Melaksanakan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional
- e. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industry karoseri



- f. Melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industry karoseri
- g. Melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan
- h. Melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
- i. Melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
- j. Melaksanakan penjaminan keamanan dan ketertiban, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
- k. Melaksanakan peningkatan kerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial

- l. Mengelola urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat
  - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bagian umum, adapun tugas pokok Bidang Ketatausahaan yaitu:

- a. Menyusun program kerja di bidang ketatausahaan Balai Pengelola Transportasi Darat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
- b. Memonitor ketatausahaan Balai Pengelola Transportasi Darat sehingga dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
- c. Menyiapkan bahan
- d. Administrasi perkantoran dilingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tata persuratan
- f. Memonitor program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
- g. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan ketatausahaan Balai Pengelola Transportasi Darat, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
- h. Mengevaluasi kegiatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program
- i. Menyusun laporan secara berkala

- j. Mengkoordinasikan pengelolaan surat masuk dan surat keluar, jadwal kegiatan pimpinan dan Surat Perintah Perjalanan Dinas
- k. Mengkoordinir penyiapan barang cetakan kantor (kop surat, stempel, bendera, plakat dan panji)
- l. Melaksanakan kegiatan penyimpanan dokumen dan pengelolaan arsip
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

### 3. Bidang Kepegawaian

Tugas Bidang Kepegawaian, yaitu:

- a. Menyusun konsep surat atau nota dinas urusan kepegawaian (usulan Kenaikan Pangkat, Diklat, Kenaikan Gaji Berkala, Ujian Dinas/ Penyesuaian Ijazah, KARPEG, ASKES, KARIS/ KARSU, Cuti, DP3, pensiun, dll)
- b. Membuat Daftar Urut Kependidikan dan Daftar Nominatif pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat
- c. Menyiapkan bahan penyusunan kebutuhan formasi pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat
- d. Melakukan analisis dan evaluasi beban kerja pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat
- e. Menyiapkan berkas/ data untuk penyusunan pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan pensiun pegawai di lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat
- f. Menyiapkan konsep surat penunjukan pelaksana harian
- g. Menyiapkan bahan usulan mutasi pegawai dalam wilayah kerja balai, bahan usulan mutasi kelas jabatan PNS



- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian ijin dan cuti bagi pegawai
  - i. Mengumpulkan SKP dan laporan bulanan masing-masing PNS, laporan bulanan pelaksanaan tugas pegawai honorer
  - j. Melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan berkas data-data pegawai aktif dan pemasukan data pegawai kedalam database kepegawaian
  - k. Menyiapkan daftar hadir pegawai dan membuat rekap kehadiran pegawai
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan
4. Bidang Urusan Kerumahtanggaan
- Tugas Bidang Urusan Kerumahtanggaan
- a. Menyusun program kerja di bidang kerumahtanggaan
  - b. Menyusun kebutuhan rumah tangga guna menunjang kelancaran pekerjaan
  - c. Mengandalkan program kerja di bidang kerumahtanggaan agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
  - d. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaannya agar program kerja dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
  - e. Menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku
  - f. Memeriksa asset Barang Milik Negara
  - g. Mengkoordinir kegiatan penyimpanan dan pengaman asset Barang Milik Negara

- h. Menginventarisir kebutuhan kerumahtanggaan
  - i. Mengkoordinasikan kegiatan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas, peralatan kerja, gedung ruang kantor dan fasilitas elektrikal dan mekanikal
  - j. Mengkoordinasikan urusan kesejahteraan pegawai
  - k. Mengkoordinasikan urusan layanan kesehatan, pengamanan dalam keprotokolan dan upacara-upacara dan kebersihan dan kerapihan kantor
  - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
5. Bidang keuangan
- Tugas Bidang Keuangan
- a. Menyusun rencana penggunaan anggaran, laporan pengelolaan keuangan dan melaksanakan kegiatan pembayaran pengeuaran anggaran
  - b. Menyiapkan kelengkapan usulan revisi anggaran, surat-surat tentang permintaan dukungan anggaran
  - c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan-bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan
  - d. Membuat dokumen rencana kebutuhan pengadaan barang/ jasa dan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa
  - e. Mengkaji ulang dan membuat perubahan paket-paket untuk dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
  - f. Menyusun persyaratan kualifikasi penyedia barang/ jasa dan memeriksa spesifikasi jasa konsultasi, menyusun jadwal pemilihan penyedia barang/ jasa

- g. Mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran penggunaan anggaran dan menyiapkan Surat Perjalanan Dinas
  - h. Mengkoordinir kegiatan pengumpulan penerimaan negara
  - i. Memonitor perkembangan kegiatan pengadaan barang/ jasa
  - j. Mengelola aplikasi-aplikasi keuangan/ anggaran
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
6. Bidang Data dan Sistem Informasi
- a. Menginventarisasi data dan informasi yang ada di unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
  - b. Menyiapkan kerangka dasar dan informasi tiap unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat
  - c. Mengelompokkan data dan informasi primer dan sekunder di lingkungan Balai Pengelola transportasi Darat
  - d. Mengumpulkan data dan informasi primer dan sekunder yang akan diolah baik internal ataupun eksternal unit kerja
  - e. Mengkompilasi serta tabulasi data dan informasi yang akan disajikan
  - f. Melakukan pengkayaan data dan informasi dari atribut-atribut yang akan melekat
  - g. Mengevaluasi aplikasi pengolahan data dan informasi yang dipakai untuk dijadikan koreksi oleh pihak pengembang
  - h. Mengevaluasi data dan informasi dalam beberpa satuan waktu secara berkala
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
7. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

- a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal
  - b. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan terminal barang
  - c. Menyusun penyusunan bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan Unit Pelaksana penimbangan Kendaraan Bermotor
  - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan
  - f. Menyiapkan bahan pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
8. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- a. Menyusun bahan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional
  - b. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang lintas batas Negara dan/ atau antar kota antar provinsi
  - c. Menyusun bahan pengawasan angkutan orang tidak dalam trayek, dan angkutan barang
  - d. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan

- e. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
  - f. Menyusun bahan pengawasan tarif angkutan jalan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh pimpinan
9. Kepala Seksi Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Perintis
- a. Menyusun bahan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan pelabuhan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
  - b. Menyusun bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
  - c. Menyusun bahan penjaminan keamanan dan ketertiban di bidang lalu lintas dan angkutan SDP
  - d. Menyusun bahan penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
  - e. Menyusun bahan peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial
  - f. Menyusun bahan pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang belum diusahakan secara komersial



- g. Menyiapkan bahan penyelenggara pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Evaluasi Kinerja Pegawai Bidang Kepegawaian Di Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara**

Evaluasi merupakan suatu program yang berpengaruh terhadap orang lain dan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati oleh suatu instansi dengan bawahan dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, Evaluasi merupakan proses dalam memiliki langkah yang panjang, yang dimulai dari mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan hingga diperoleh hasil yang sesungguhnya yang diharapkan bersama.

Salah satu kutipan hasil wawancara dengan Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.00 Wib yaitu Bapak Batara Pardede, S.T, M.T menanyakan evaluasi kinerja pegawai setelah peralihan, berikut kutipannya:

“Lebih baik walaupun ada beberapa yang perlu dievaluasi kembali.”

Peralihan tentunya tidak mudah mengingat adanya perubahan pasti memerlukan proses dalam adaptasi, peneliti menangkap pernyataan “ada beberapa yang perlu dievaluasi kembali”. Dalam proses ini, tidak semua langsung bisa ditanggulangi seketika dan harus dilakukan bertahap. Dan ternyata saat observasi

peneliti mengetahui bahwa peralihan ini hanya sebagian urusan (bukan kekuasaan) yang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini jelas ditekankan oleh Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dalam sesi wawancara saat observasi. Peneliti menganalisis, terjadi peralihan merupakan suatu keputusan yang diambil dengan bijak melihat perubahan yang lebih baik. Setiap organisasi pasti memiliki permasalahan didalamnya, akan tetapi bagaimana pemimpin tersebut bijak dalam menangani masalah tersebut. Selagi bisa ditanggulangi tentunya jangan sampai melakukan Perubahan yang signifikan yang berdampak atau berisiko lebih besar.

Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara nyata dapat dicapai seseorang dalam bekerja agar berhasilnya suatu pekerjaan. Berdasarkan definisi diatas, indikator pengukuran kinerja dalam evaluasi menurut Mangkunegara dalam proses kinerja pegawai bidang kepegawaian di Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

#### **4.2.1.1 Kualitas Kerja**

Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang pegawai mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan. Kegiatan pelaksanaan tugas harus mengacu pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Pegawai adalah orang atau seseorang yang menjual jasa (pikiran dan tenaga) untuk mendapatkan kompensasi (balas jasa) yang besarnya telah

ditetapkan terlebih dahulu, dimana mereka (pegawai) wajib dan terikat untuk selalu mengerjakan pekerjaan yang diberikan dan berhak memperoleh gaji sesuai dengan perjanjian.

Observasi yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai tokoh utama dalam penelitian ini yakni Bapak Batara Pardede, S.T, M.T selaku Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.00 Wib mengenai Kualitas Kinerja pegawai dan berikut pernyataannya :

“Kualitas kerja pegawai, sejauh ini cenderung ada peningkatan.”

Dalam pernyataan berikut, peneliti menangkap keputusan peralihan ini berdampak baik untuk BPTD Wilayah II Provsu. Kalimat “sejauh ini cenderung ada peningkatan” dapat diartikan dari dimulainya peralihan tersebut terjadi proses Perubahan kearah yang lebih baik dari segi kualitas kerja pegawai. Dan memungkinkan akan lebih baik lagi kedepannya jika terus dilakukan pemantauan. Dan kata “cenderung” mengartikan pemerhatian lebih focus kepada para pegawai karena terjadinya peralihan ini.

Berdasarkan pernyataan yang dilakukan dengan Bapak Santri Aang Amin Abidin, ST. sebagai Kepala TU di Kantor Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 2021, pukul 10.00 WIB. Peneliti menanyakan tentang Kualitas Kerja Pegawai di BPTD II Provinsi Sumatera Utara, Bapak Santri menerangkan bahwa :

“Kualitas kerja di Kantor BPTD merupakan kegiatan Pelaksanaan Tugas Pegawai yang mengacu pada Standar Operational Prosesur (SOP) guna tercapainya tujuan organisasi tempat dimana kita bekerja dan salah satunya adalah disiplin kerja pegawai. Pegawai di BPTD bertugas sesuai dengan SOP, mereka melaksanakan tugas dengan akurat dan tidak ada kesalahan, tetapi ada juga beberapa pegawai yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Kerjasama Tim di BPTD baik sesuai dengan tugas Tim tersebut di BPTD seperti Tim Perencanaan Anggaran, Tim Aset (BMN) dan lain-lainnya”.

Penjelasan diatas menegaskan bahwa keadaan di BPTD Wilayah baik-baik saja, mereka menjalankan tugas sesuai yang diperintahkan dari atasan, tidak ada kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kinerja. Tetapi, untuk segi kedisiplinan masih ada yang mengesampingkan itu. Tapi, untuk hal lain semua berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan ditempat penelitian, penulis mendapatkan data keseluruhan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yang bekerja di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 4.2.1 DATA JUMLAH PENDIDIKAN PEGAWAI DI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH II PROVINSI SUMATERA UTARA PADA TAHUN 2021**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	1
2	Sekolah Menengah Pertama	9
3	Sekolah Menengah Atas	148
4	Sekolah Menengah Kejuruan	33
5	Diploma 1	-
6	Diploma 2	3
7	Diploma 3	22
8	Diploma 4	7
9	Strata 1	120
10	Strata 2	9
11	Strata 3	-
<b>Jumlah</b>		<b>352</b>

*Sumber: Data Jumlah Pendidikan di Balai Pengelola Transportasi Wilayah II Provinsi Sumatera Utara*

Berdasarkan data jumlah pendidikan Balai Pengelola Transportasi Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 diatas menunjukkan bahwa ada seorang pegawai yang hanya tamatan SD dengan persentase 0,0028%, ada 9 orang pegawai yang tamatan SMP dengan persentase 0,025%, ada 148 orang pegawai yang tamatan SMA dengan persentase 0,42%, ada 33 orang pegawai yang tamatan SMK dengan persentase 0,093%, ada 3 orang pegawai yang tamatan Diploma 2

dengan persentase 0,0085%, ada 22 orang pegawai yang tamatan Diploma 3 dengan persentase 0,062%, ada 7 orang pegawai yang tamatan Diploma 4 dengan persentase 0,0198%, ada 120 orang pegawai yang tamatan Strata 1 dengan persentase 0,340%, dan ada 9 orang pegawai yang tamatan Strata 2 dengan persentase 0,025%.

Dan jumlah pendidikan pegawai yang paling banyak adalah tamatan SMA yaitu 148 orang dengan persentase 0,42% dan yang paling sedikit adalah tamatan SD yaitu seorang dengan persentase 0,0028%. Berdasarkan data laporan yang di dapatkan peneliti, bahwa jumlah pegawai yang ada di Balai Pengelola Transportasi Wilayah II Provinsi Sumatera Utara sebanyak 437 orang. Jika dilihat berdasarkan informasi pendidikan pegawai dengan jumlah 352 orang, maka ada 85 orang yang tidak memiliki data status pendidikan terakhirnya.

Ditinjau kembali bahwa lulusan pendidikan bukan segalanya dalam menentukan kinerja seseorang. Tetapi juga merupakan faktor terpenting dalam dunia sosial seperti lingkup pekerjaan. Apalagi pekerjaan yang dilakukan mencakup banyak orang dan berhubungan dengan negara. Banyak juga orang yang terlahir tidak dapat mengenyam pendidikan yang layak seperti banyak orang lainnya. Mempunyai tekad kuat dalam proses kesuksesannya dengan belajar otodidak baik dari buku, jurnal, karya ilmiah, temuan dan bahkan yang sekarang biasa dilakukan melalui internet. Sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, berulang diasah dengan baik dan di implementasikan di dunia kerja maka itu lebih penting dibandingkan orang yang hanya mempelajari teori saja. Tentunya di perbaiki dari setiap kesalahan yang dilakukan kemarin dengan belajar.

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Sudarno, SE. Sebagai pegawai bidang kepegawaian di BPTD II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 2021, pukul 11.00 WIB mengenai Kualitas Kerja, yakni :



“Kualitas kerja seorang pegawai adalah mengerjakan pekerjaan tepat waktu, melaksanakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan dan dilakukan sesuai ketentuan. Dalam melaksanakan tugas, pegawai-pegawai di BPTD Wilayah II Provsu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan jika ada kesalahan akan cepat direvisi. Melakukan koordinasi antar seksi di BPTD Wilayah II Provsu, Koorsatpel, yang selalu dilakukan Kepala BPTD Wilayah II Provsu”.

Peneliti menganalisa hasil wawancara, bahwa kualitas kerja pegawai BPTD Wilayah II Provsu cepat mengambil sikap dan tindakan setelah melakukan kesalahan, dengan memperbaiki kesalahan. Melalui kerja sama yang baik antar divisi dari segi hal komunikasi dalam pembahasan tugas dan tanggung jawab. Seperti halnya prosedur kerja, saat atasan memberikan perintah untuk tupoksi maka dilaksanakan oleh bawahan ataupun pegawai. Kemudian dilaporkan kembali hasil tersebut kepada atasan untuk memeriksa tugas sudah di kerjakan dengan benar. Jika ada kesalahan, maka perlunya perbaikan sampai semuanya sesuai tujuan yang ingin dicapai. Untuk hal itu, BPTD Wilayah II Provsu dikatakan oleh bapak Sudarno sudah dilaksanakan dengan baik semestinya. Dikarenakan koordinasi yang dilakukan oleh atasan-atasan yang ada di BPTD Wilayah II Provsu.

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu Astrindita Devika, A.md selaku pegawai di bidang kepegawaian di BPTD Wilayah II Provsu pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 10.00 WIB mengenai Kualitas Kerja, sebagai berikut :

“Seorang pegawai seharusnya mengerjakan pekerjaan sesuai dengan Tupoksinya dan harus bisa bekerjasama dengan pegawai yang lain. Kualitas pegawai BPTD masih boleh dikatakan rata-rata, masih perlu di poles lagi ditingkatkan lagi. Yang namanya manusia di dalam melaksanakan tugas sehari-hari pasti ada melakukan kesalahan. Kerjasama tim di BPTD antara lain, antara seksi yang satu dengan yang lain harus saling mendukung dan kerjasama”.

Sama seperti hal yang di katakan Bapak Sudarno untuk kegiatan sehari-hari dalam melaksanakan tupoksi semua pegawai saling mendukung satu sama lain dan bekerjasama. Kesalahan yang diterangkan oleh Ibu Astrindita dalam kutipan itu adalah seperti keterlambatan bekerja dan kesalahan dalam proses pelaksanaan tugas yang masih bisa di perbaiki dan di peringatkan.

Perlu adanya peningkatan yang dimaksud dalam kutipan “masih perlu dipoles lagi” yakni bahwa cukup baik kinerja para pegawai. Akan tetapi, akan lebih baik jika semua pegawai BPTD Wilayah II Provsu bekerja dengan baik tentunya tidak menyita waktu yang lebih lama untuk mengerjakan tupoksinya. Bahkan tidak menumpuk pekerjaan karena sudah diselesaikan sesuai tenggat waktunya.

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada Bapak King Rasoki Survival Immanuel, S.H sebagai pegawai di bidang pegawaian di BPTD Wilayah II Provsu pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB mengenai Kualitas kerja yakni :

“bisa dikatakan cukup baik, melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang ada. Cuma ya namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan seperti terlambat masuk kerja, atau tugas-tugas yang diberi atasan ada yang terlambat dilaksanakan atau terkendala. Normal sepertinya layaknya kantor pemerintah lainnya. Namanya suatu instansi semua bidang pasti sudah ada tugasnya masing-masing dan itu semua berkaitan satu sama lain, dan harus dilakukannya kerjasama diluar dari urusan pribadi.”

Analisa wawancara Bapak King menunjukkan kinerja pegawai di BPTD Wilayah II Provsu sama seperti di Dinas Pemerintahan lainnya, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan di ruang lingkup kerja: keterlambatan, penyelesaian tugas yang harus direvisi, hambatan pelaksanaan tugas karena kurangnya komunikasi antar tim atau divisi lainnya, hubungan atasan dan

bawahan yang tidak baik juga mempengaruhi situasi di ruang lingkup kerja menjadi emosional yang bisa membawa dampak terhadap hasil kinerja. Diluar semua itu, BPTD Wilayah II Provsu cukup baik dari segi kualitas kerja.

Berdasarkan observasi dan wawancara, peneliti menganalisis bahwa kualitas kerja di BPTD Wilayah II Provsu cukup baik, tentunya dibarengi dengan perubahan yang lebih baik lagi kedepannya. Seperti, adanya beberapa kesalahan yang bisa kita katakan normal seperti terlambat masuk kerja baik itu karena urusan pribadi, ataupun ketidaksengajaan saat diperjalanan. Tetapi itu merupakan tupoksi yang wajib dilaksanakan diluar alasan apapun. Memang sudah kewajiban mereka yang harus menjalankan tugasnya dengan baik dan mereka juga mendapatkan feedback dari itu semua seperti gaji pokok, tunjangan bahkan fasilitas dari pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas.

Akan tetapi, hal positif dalam intansi ini yakni hubungan kerjasama tim, divisi, seksi dan lainnya memang berkaitan satu sama lain dan terlaksanakan dengan baik pula agar kegiatan berjalan semestinya. Tentunya saling membantu dan mendukung sesama rekan kerja. Pemantauan terus menerus yang dilakukan oleh atasan juga sangat berperan penting dalam hal evaluasi kualitas kerja pegawai.

#### **4.2.1.2 Kuantitas Kerja**

Kuantitas kerja yaitu seberapa lama seseorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan masing-masing kerja setiap pegawai. Di dunia pekerjaan dimana suatu organisasi akan menuntut para pegawainya bahkan mengharuskan adanya kualitas pada suatu pekerjaan,

kuantitas pekerjaan yang menyangkut target yang akan dicapai (pencapaian target), dan menghasilkan kerja yang sesuai dengan organisasi.

Kita sebagai pegawai dalam suatu organisasi juga harus memiliki ketepatan waktu yang termasuk dalam suatu kuantitas kerja. Dimana pegawai harus memiliki paham yang memandang waktu sebagai sumber daya yang harus benar-benar dipergunakan dengan tepat dan mempraktikkan pada tugas yang diberikan orang pada tepat waktu yang ditentukan serta mengutamakan prinsip efisien.

Observasi yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai tokoh utama dalam penelitian ini yakni Bapak Batara Pardede, S.T, M.T selaku Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.00 Wib mengenai Kuantitas Kinerja Pegawai di BPTD Wilayah II Provsu, berikut pernyataannya:

“Kuantitas kerja pegawai sejauh ini bertambah.”

Menganalisis pernyataan diatas, kata “bertambah” yang dimaksudkan oleh Kepala Dinas adalah kuantitas pekerjaan yang menyangkut target yang akan dicapai (pencapaian target). Dikarenakan peralihan, membawa Perubahan tentunya harus adaptasi dengan hal baru dan memperbaiki kesalahan lama. Otomatis dalam hal ini tentunya pekerjaan pegawai di BPTD Wilayah II Provsu bertambah dari biasanya dan harus lebih produktif dibanding sebelumnya.

Analisis diatas, peneliti membuktikan dengan kutipan wawancara dengan Kepala Dinas yang menyatakan :

“Ada Perubahan SOP, yang mana seluruh SOP yang bersentuhan dengan masyarakat pada umumnya dominan dengan kegiatan pelayanan.”

Bisa diartikan saja adanya Perubahan SOP terutama dibagian pelayanan berarti membuat pegawai BPTD Wilayah II Provsu harus beradaptasi dengan peraturan yang baru. Yang Namanya proses Perubahan tidak ada yang mudah dan tentunya harus melihat sisi positif dan negatif dari Perubahan yang telah dijalankan. Makanya diatas dikatakan oleh Kepala Dinas masih ada yang perlu dievaluasi kembali dikarenakan baru berjalan prosedur tersebut tentunya masih dalam pantauan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Santri Aang Amin Abidin, ST. sebagai Kepala TU di Kantor Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 2021, pukul 10.00 WIB. Menanyakan tentang Kuantitas Kerja di BPTD Wilayah II Provsu yaitu :

“Dalam satu (1) hari kita bekerja rata-rata 7,5–8 jam . kecepatan bekerja tergantung dengan kebutuhan, ada yang harus diselesaikan dalam satu (1) hari atau dua (2) hari dan seterusnya”.

Dalam satu hari dengan durasi sampai 8 jam itu, sudah berapa banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh pegawai BPTD Wilayah II Provsu. Nah, ini tergantung kemampuan masing-masing pegawai dalam pengerjaan tugas yang sudah sesuai dengan jabatannya. Ini sering kali dipermasalahkan didalam dinas yang bertugas dalam pelayanan publik. Sering dikeluhkan oleh pegawai yang berskill profesional dalam hal penggunaan elektronik dan bidang tata meja



atau administrasi. Mengeluhkan kinerja pegawai yang lebih tinggi jabatannya tapi tidak mampu melaksanakannya sesuai dengan tupoksinya.

Penilaian terhadap kuantitas kinerja pegawai biasanya dengan membandingkan target dengan pencapaian yang dihasilkan oleh pegawai. Jika pegawai dapat melampaui batas target, maka ia dikatakan berhasil. Tetapi jika kuantitas pegawai rendah, maka perlu adanya evaluasi kinerja pegawai. Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Sudarno, SE. selaku pegawai di bidang kepegawaian di BPTD II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 2021, pukul 11.00 WIB peneliti menanyakan tentang Kuantitas Kerja, yakni :

“Pekerjaan pegawai di BPTD Wilayah II Prov. Sumut 8 jam sehari dan metode kerja ditentukan masing-masing seksi”.

Setiap pegawai harus memiliki pemikiran bahwa setiap pekerjaan memiliki tenggat waktu. Baik itu dalam tupoksinya maupun jadwal bekerja. Tenggat waktu juga menentukan kinerja pegawai dalam menyelesaikan tugasnya, mendorong pegawai memiliki rasa tanggungjawab atas amanah yang diberi. Salah satu pegawai lainnya juga peneliti wawancarai yaitu Ibu Astrindita Devika, A.md pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 10.00 WIB Kuantitas Kerja, sebagai berikut :

“Sesuai dengan peraturan pegawai bekerja 7 ½ sampai 8 jam sehari. Kecepatan dalam menjalankan tugasnya masih kurang”.

Pernyataan “masih kurang” diatas yang dimaksudkan Ibu Astrindita seperti tidak tepat waktu menyelesaikannya, juga sebenarnya banyak pegawai yang tidak memahami bentuk tugasnya misal cara membuat file tertentu yang

dikarenakan tidak mahir menggunakan perangkat digital. Kebanyakan yang sudah lansia tidak mampu mengikuti perkembangan digital padahal juga sudah dilibatkan dalam pelatihan-pelatihan, mungkin dikarenakan usia yang susah untuk menangkap ilmu baru. Untuk yang muda, sering pula ada isu masuk pegawai melalui rekan, saudara dan keluarga. Tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sebenarnya itu bisa saja diperbaiki jika dia bersungguh-sungguh dengan pekerjaannya.

Pertanyaan yang sama mengenai kuantitas kerja juga diajukan pada Bapak King Rasoki Survival Immanuel, S.H sebagai pegawai di bidang kepegawaian di BPTD Wilayah II Provsu pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB yakni :

“Sama seperti instansi pemerintah lainnya, 7-8 jam sehari mulai dari jam 8.00 sampai 16.00 WIB. Dalam menjalankan tugas ya sesuai dengan Tupoksi masing-masing. Ya Cuma kadang kalo menumpuk rada lambat dan kalo sedikit mungkin cepat.

Salah satu dari tugas dan kewajiban tidak sesuai dengan tenggat bahkan lali, maka seterusnya akan kacau. Tergantung dari cara pegawai tersebut menyelesaikan masalah yang sebelumnya untuk mneghindari masalah selanjutnya yang akan berkepanjangan jika tidak dituntaskan. Salah satu hal juga yang membuat tergesernya tenggat kerja adalah kuantitas kerja yakni keterlambatan. Yang seharusnya di waktu yang sudah ditentukan dia harus mulai bekerja tetapi dikarenakan keterlambatan tadi maka waktu jam kerjanya sudah tidak benar.

Dengan demikian, peneliti menganalisis Kuantitas Kinerja Pegawai di BPTD Wilayah II Provsu yakni bisa dikatakan belum maksimal. Dimana masih ada karyawan yang tidak mendayagunakan kewajiban dengan baik. Tidaklah mudah mengingat dalam proses adaptasi peralihan yang masih dalam pantauan

terus menerus oleh atasan. Dalam proses pengerjaan yang tidak sesuai dengan target entah itu disengaja maupun tidak, pegawai yang tidak paham dengan elektronik. Perlu adanya evaluasi untuk pegawai terhadap kuantitas kerja baik mungkin dari segi sistem yang ditingkatkan maupun pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia. Ditambah lagi setelah peralihan, pekerjaan juga lebih banyak tentunya pegawai juga belum biasa dan kewalahan untuk menyelesaikannya satu persatu.

#### 4.2.1.3 Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas yaitu seberapa jauh pegawai mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. Observasi yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai tokoh utama dalam penelitian yakni Bapak Batara Pardede, S.T, M.T selaku Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.00 Wib mengenai Pelaksanaan Tugas yang dilakukan oleh pegawai BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara, berikut pernyataannya:

“Cukup akurat namun masih terdapat beberapa kesalahan, yang disebabkan oleh masih perlunya dilakukan peningkatan dan penambahan SDM.”

Memang banyak dikeluhkan berbagai instansi pemerintah mengenai kurangnya pegawai tidak sebanding dengan banyaknya tuntutan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Bahkan Kepala Dinas sendiri menyatakan hal demikian. Belum dikteahui juga bagaimana kelanjutan dari Pemerintah Pusat perihal SDM yang kurang dan apakah Pemda dan Pemprov mengusulkan dan

berkomentar kepada Pemerintah Pusat, tentunya ini diuar pembahasan. Dan dari segi pelaksanaan tugas yang masih terdapat kesalahan sudah hal yang biasa yang penting ada tindaklanjut yaitu tanggung jawab dari pelaksanaan tugas tersebut.

Peralihan membuat adanya Perubahan dari segi Pelaksanaan Tugas dan didapatkan oleh peneliti saat observasi bahwa adanya Perubahan khususnya UPPKB/Jembatan Timbang yang sebelumnya didasari Peraturan Daerah melakukan Pengutipan Retribusi dan pengawasan kelebihan muatan guna menunjang faktor keselamatan, namun saat ini hanya total untuk pengawasan saja, begitu juga dengan Terminal Tipe A sebelumnya ada Pengutipan Retribusi sesuai Peraturan Daerah dan Pelayanan Angkutan Penumpang, saat ini tidak ada lagi retribusi, namun perolehan keuangan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui sewa fasilitas terminal seperti Tenan/Kios dan sekarang setiap angkutan penumpang Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) wajib dilakukan pemeriksaan layak jalan kendaraan (rampcheck) di Terminal sebelum melakukan perjalanan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Santri Aang Amin Abidin, ST. sebagai Kepala TU di Kantor Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 2021, pukul 10.00 WIB. Menanyakan tentang pelaksanaan tugas pegawai di BPTD Wilayah II Provsu, yaitu:

“BPTD Wilayah II dalam Pengelolaan Transportasi Darat melakukan pengawasan terhadap lalu lintas angkutan orang dan angkutan barang. Untuk angkutan orang melakukan pengawasan melalui terminal dan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Wilayah II Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan untuk pengawasan angkutan barang melalui UPPKB yang ada di wilayah

kerja BPTD seperti UPPKB Sibolangit, Dolok Estate Limapuluh, Mambang Muda, Aek Kanopan, Aek Batu serta Jembatan Merah.

Proses kerja BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara didalam pengelolaan transportasi darat yaitu melakukan tugas pengawasan dan keselamatan angkutan orang dan angkutan barang, seperti Pelabuhan penyeberangan kita juga melakukan pengawasan sesuai dengan SOP dan memberikan Surat Persetujuan Berlayar kepada kapal-kapal yang akan melakukan pelayaran atau penyeberangan melalui pelabuhan yang seperti pelabuhan penyeberangan Ajibata menuju Ambarita, Pelabuhan Penyeberangan Tigaras menuju Simanindo, Pelabuhan Penyeberangan Muara menuju Sipinggian dll. Untuk angkutan bus pengawasan dilakukan melalui Terminal-terminal dengan melakukan kegiatan Ramcheck terhadap bus-bus yang akan melakukan perjalanan.”

Seerti pada umumnya, instansi pemerintah melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi, juga dilakukan kepada para pegawai jika ada peraturan-peraturan baru tentang kepegawaian. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan seperti Diklat dan Bimtek yang diwajibkan untuk para pegawai dilingkungan Kemenhub. Dalam upaya meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas juga di seleraskan dengan disiplin pegawai dan dorongan motivasi.

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Sudarno, SE. selaku pegawai di bidang kepegawaian di BPTD II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 2021, pukul 11.00 WIB peneliti menanyakan tentang Pelaksanaan Tugas, yakni :

“Pengelolaan Transportasi Darat terdiri dari: Terminal Tipe A, UPPKB dan Pelabuhan Penyeberangan Batas Pengelolaan Transportasi Darat BPTD Wilayah II Provsu yaitu batas Sumbar, Riau, NAD. Proses kerja BPTD Wilayah II Provsu seperti prosedur penyeberangan di kawasan Danau Toba dan pelabuhan Sibolga adalah pengecekan terhadap penumpang dan kendaraan (*manifest*) yang menggunakan kapal yang akan berangkat”.

Setiap adanya kebijakan dan peraturan maka adanya pemantauan yang harus dilakukan. Dengan melakukan monitoring ke tiap-tiap unit kerja untuk



melihat sinkronisasi laporan dan keadaan lapangan secara berkala dan dapat juga dilakukan secara dadakan.

Salah satu pegawai di bidang kepegawaian lainnya juga diwawancarai peneliti yaitu Ibu Astrindita Devika, A.md pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 10.000 WIB Pelaksanaan Tugas, sebagai berikut :

“Macam Pengelolaan Transportasi Darat oleh BPTD Wilayah Provsu :

1. UPPKB / Jembatan Timbang yang dibuka di daerah masuk antar provinsi
2. Terminal Bus Tipe A yang dikelola oleh Kementerian seperti Pinang Baris, Amplas, Tj. Pinggir Siantar, Tarutung dan Sibolga.
3. SDP adalah penyeberangan orang dan barang dari satu Kabupaten ke Kabupaten lain. Adapun lokasinya terdapat di daerah Danau Toba dan Sibolga.

Proses penyeberangan yang dilakukan oleh BPTD petugas mengontrol jumlah penumpang sesuai dengan *manifest* yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pihak syahbandar (istilah pelabuhannya).”

Kegiatan biasanya dilakukan dengan membentuk tim oleh pemimpin untuk memonitoring satpel/ unit-unit kerja di lingkungan BPTD Wilayah II Provsu. Serta memperbaiki/memberikan sarana dan prasarana pendukung agar terlaksananya tugas di masing-masing unit kerja. Pernyataan Bapak King Rasoki Survival Immanuel, S.H sebagai pegawai di bidang kepegawaian di BPTD Wilayah II Provsu pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB menanggapi tentang Pelaksanaan Tugas, yakni :

“Penjamin keamanan dan ketertiban serta penyidikan dan pengusulan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan Perundang-Undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Sungai , Danau dan Penyeberangan (SDP), pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (SDP)”.

Dapat dianalisis, bahwa Pelaksanaan Tugas di BPTD Wilayah II Provsu cukup baik. Adanya pemantauan – pemantauan yang sering dilakukan ke unit-

unit kerja yang terbagi untuk melihat proses pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan kewajiban. Bahkan juga informan menyampaikan sering diadakan tidak sesuai jadwal tetapi tiba-tiba, untuk melihat tentunya apakah ada kecurangan dalam bekerja. Adanya Perubahan pelaksanaan tugas untuk pegawai lapangan perihal retribusi. Kemudian, tinjauan pelaksanaan pegawai di kantor BPTD Wilayah II Provsu berjalan dengan baik seperti melaksanakan diklat, Bimtek dan hal lain diluar kantor yang pastinya dengan begitu mendukung evaluasi kinerja pegawai.

#### 4.2.1.4 Tanggung Jawab

Tanggungjawab yaitu kesadaran akan kewajiban melakukan pekerjaan dengan akurat atau tidak ada kesalahan. Observasi yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai tokoh utama dalam penelitian ini yakni Bapak Batara Pardede, S.T, M.T selaku Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 24 Juli 2023, pukul 11.00 Wib mengenai Tanggungjawab, berikut pernyataannya:

“Wajib melakukan penyelesaian pekerjaan sampai selesai dan melakukan koordinasi dengan pegawai lainnya jika diperlukan.”

Intinya setiap pegawai memiliki tanggungan masing-masing dan harus diselesaikan. Diperlukannya koordinasi dengan pegawai lain maksudnya semisal pekerjaan pegawai A dan B itu saling berhubungan dan memerlukan berkas, informasi, data, ataupun persetujuan tentunya harus saling koordinasi agar tidak terjadi penyimpangan, juga dengan atasan pun harus begitu. Agar saat dimintai pertanggungjawaban kita sebagai pegawai yang menanggungjawab pekerjaan

tersebut kita sudah punya data, informasi dan sudah saling koordinasi. Jadi cukup bukti untuk mematahkan pernyataan jika kita tidak terbukti melakukan kesalahan.

Untuk menggali lebih dalam peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Santri Aang Amin Abidin, ST. sebagai Kepala TU di Kantor Kementerian Perhubungan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 16 Juli 2021, pukul 10.00 WIB:

“Pegawai di BPTD bertanggung jawab didalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ada juga beberapa pegawai yang lalai atau tidak bertanggung jawab didalam melaksanakan tugasnya karena ketidakdisiplinan mereka”.

Yang berwenang dalam melakukan evaluasi kinerja adalah pimpinan langsung unit kerja. Pegawai BPTD Wilayah II Provsu juga mempunyai tanggungjawab yakni membuat laporan bulanan secara rutin atas kinerjanya dan diserahkan di awal bulan ke bagian kepegawaian.

Wawancara juga dilakukan dengan Bapak Sudarno, SE. Pegawai di bidang kepegawaian di BPTD II Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 22 Juli 2021, pukul 11.00 WIB peneliti menanyakan tentang Tanggung Jawab, yakni :

“Pada umumnya, pegawai di BPTD Wilayah II Provsu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, jika ada pegawai yang lalai dalam melaksanakan tupoksinya akan dilakukan pembinaan”.

Sebagai pegawai yang menerima pendapatan dari pemerintah, pegawai harus lah memberikan feedback terhadap pemerintah dan untuk masyarakat pula dengan komitmen atas kinerja untuk mencapai tujuan dengan menyelesaikan pekerjaan dengan semestinya. Dengan pula mengikuti aturan yang telah

ditetapkan, meminimalisir suatu kesalahan dalam bekerja dan pula memperbaikinya jika ada kesalahan.

Salah satu pegawai di bidang kepegawaian lainnya juga peneliti wawancara yaitu Ibu Astrindita Devika, A.md pada tanggal 10 Agustus 2021, pukul 10.00 WIB tentang Tanggung Jawab, sebagai berikut :

“Relatif tergantung manusianya”.

Pertanyaan yang sama juga dilontarkan ke Bapak King Rasoki Survival Immanuel, S.H sebagai pegawai di bidang kepegawaian di BPTD Wilayah II Provsu pada tanggal 20 Agustus 2021, pukul 09.00 WIB yakni :

“Semua pegawai pastilah mengerjakan tugasnya masing-masing. Siapa juga yang mau ngerjain tugas orang lainkan. Tapi pastinya dalam proses itu terjadi lah hal-hal yang itu disengaja pihak atau tidak dalam menjalankannya yang membuat mereka bisa dikatakan tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tupoksinya kan. Kalau sengaja ya dikatakanlah lalai dalam pekerjaan, kalau tidak sengaja bisa dikatakan tidak teliti dalam pengerjaan. Tapi yang lain ataupun atasan juga punya tugas masing-masing jadi tidak mungkin juga selalu memantau yang lainnya apa dia sengaja melakukan atau tidak. Ya namanya manusia, kadang akal pikirnya bekerja kalau soal manipulatif ya.”

Menganalisis hasil wawancara mengenai Tanggungjawab, bahwa pegawai BPTD Wilayah II Provsu belum maksimal. Masih ada pegawai yang melalaikan tanggungjawabnya dengan mengerjakan tugas dengan bermalasan, bisa dikatakan manipulatif. Tetapi, juga ada penanggulangan yang tentunya dilakukan oleh mereka yakni pembinaan. Biasanya hal yang tidak sesuai dengan kinerja semestinya akan mendapat teguran pertama dari atasan ataupun seseorang yang memberikan tugas untuk menyelesaikannya sebagai tanggungjawab. Tentulah jikalau hanya berhenti di teguran dia akan memperbaikinya, tetapi jika terusan berkelanjutan bahkan fatal maka Tindakan dari mereka yakni pembinaan seperti

halnya diklat. Dan diluar daripada itu semua, pekerjaan adalah tanggungjawab untuk semua pegawai. Dan para atasan, juga bertanggungjawab atas hasil kerja para bawahan mau itu baik atau buruk.

#### **4.2.2 Faktor – Faktor Penghambat Kinerja Pengelolaan Transportasi Darat oleh BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara**

##### **a. Kurangnya Sumber Daya Manusia**

Sebagai salah satu faktor penghambat, SDM di BPTD Wilayah II yang dirasakan oleh pegawai-pegawai yang bekerja di instansi tersebut sering sekali kewalahan dalam menjalankan tugas, apalagi tugas yang dilakukan banyak terjadi dilapangan. Keluhan yang terjadi saat peneliti menggali informasi terkait kinerja pegawai yakni faktor SDM.

Bahkan bukan instansi ini saja, sepertinya banyak instansi pemerintah merasakan kekurangannya pegawai ASN di instansinya atau di bidang-bidangnya. Tidak memadainya jumlah pegawai yang ada dengan tupoksi yang harus dijalankan. Sehingga banyak instansi pemerintah bahkan bisa dikatakan hampir semua instansi pemerintah mempekerjakan pegawai honorer. Tetapi, baru-baru saja awal tahun 2020 gubernur mengumumkan setiap instansi pemerintah di Provinsi Sumatera Utara harus memotong 50 % dari jumlah pegawai honorer yang ada.

##### **b. Kurangnya Disiplin dan Mematuhi Peraturan bagi Pegawai di dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya.**



Hal seperti ini acap kali terjadi di perusahaan mana saja, tindakan kedisiplinan yang harus ditegaskan serta mode peraturan yang lebih detail terhadap pegawai pun dilakukan oleh perusahaan baik swasta/negeri/pemerintah/non-pemerintahan. Dari mulai tipe pengabsenan yang bermula manual, menjadi absen online kemudian berubah alih menjadi absen dengan menggunakan fingerprint pun sudah dilakukan.

Observasi yang dilakukan peneliti dengan mewawancarai tokoh utama dalam penelitian ini yakni Bapak Batara Pardede, S.T, M.T selaku Kepala BPTD Wilayah II Provinsi Sumatera Utara mengenai apa saja faktor penghambat dalam evaluasi kinerja, berikut pernyataannya:

“Masih terdapat PNS yang kurang disiplin.”

Mengapa hal ini sudah Menjadi kebiasaan orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan. Banyak kemungkinan alasan untuk melakukan hal ini, beberapa hal yang bisa mempengaruhi Tindakan tersebut untuk dilakukan yakni: besar kecilnya pendapatan/kompensasi yang didapatkan tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan, tidak keteladanan pimpinan perusahaan dalam memberikan contoh yang baik kepada bawahan, aturan yang tidak tetap/tegas bisa menjadi pegangan untuk beralasan, dan bisa jadi pembawaan individu masing-masing dalam bertindak sejauh itu (keberanian).

Terkadang masih saja pegawai-pegawai tidak disiplin bahkan melakukan kecurangan, sampai absen dengan metode scan wajah. Tetapi dari informasi terkait, untung saja di BPTD Wilayah II Provsu tidak ada kecurangan yang dilakukan terhadap absensi. Hanya saja kelalaian dalam seperti manajemen waktu.

### c. Belum Maksimalnya Penempatan Pegawai

Jika penempatan Sumber Daya Manusia atau tenaga kerja sesuai dengan keahliannya, maka pekerjaannya akan lebih efektif karena dibidang yang dikuasainya dan mungkin yang dia sukai pula maka hasilnya akan baik. Tetapi, jika sebaliknya maka terjadilah seperti waktu yang lama atau tidak efisien, kesalahan dalam melaksanakannya, bahkan lalai.

Hal ini terjadi di BPTD Wilayah II Provsu, dimana ada bagian wawancara peneliti dengan informan lebih dalam menggali informasi. Bahwa salah satu informan mengeluhkan posisi pegawai di BPTD Wilayah II Provsu yang tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Tidak mengetahui tugas, pokok dan fungsinya juga lambat dalam melaksanakannya bahkan lalai.

